



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TIM PROMOTOR DAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SKEMA.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
INTISARI.....	xx
<i>ABSTRACT</i> .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Perumusan Masalah.....	15
C Tujuan Penelitian.....	15
D Manfaat Penelitian.....	16
E Keaslian Penelitian.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia.....	21
1. Sejarah Pluralisme Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan Indonesia.....	21
2. Pengertian Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia.....	35
3. Tujuan Perkawinan.....	52
4. Asas-Asas Perkawinan.....	58
5. Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan.....	67
6. Syarat-Syarat Perkawinan.....	72
7. Pencegahan Perkawinan.....	79
8. Pembatalan Perkawinan.....	83



	9. Akibat Hukum Perkawinan.....	90
	10. Bubarnya Perkawinan.....	99
B	Perkawinan Siri dalam Sistem Hukum Indonesia.....	104
C	Anak dalam Sistem Hukum Indonesia .....	108
	1. Pengertian Anak.....	108
	2. Status dan Kedudukan Anak Sah dan ALK dalam Sistem Hukum Indonesia.....	111
D	Hak Keperdataan Anak.....	124
E	Lembaga “Pengakuan Anak” dan “Pengesahan Anak Luar Kawin” dalam Sistem Hukum Indonesia.....	127
	1. Lembaga Pengakuan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.....	127
	2. Lembaga Pengesahan ALK dalam Sistem Hukum Indonesia.....	131
F	Hak Asasi Manusia, Hak Anak dan Relasi terhadap Hak Keperdataan Anak.....	135
G	Landasan Teori.....	146
	1. Teori Negara Hukum Pancasila ( <i>Grand Theory</i> ) .....	147
	2. Hukum sebagai Instrumen Rekayasa Sosial ( <i>Middle Range Theory</i> ) .....	153
	3. Teori Fungsi Hukum/ <i>Ide des Rechts Theory (Applied Theory)</i> ...	158
	4. Teori Perlindungan Hukum ( <i>Legal Protection Theory</i> ).....	159
BAB III	METODE PENELITIAN.....	163
A	Cara Penelitian.....	163
	1. Sifat Penelitian.....	163
	2. Jenis Data.....	164
	3. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	167
	4. Lokasi Penelitian.....	168
	5. Jalannya Penelitian.....	170
	6. Analisis Data.....	171
	7. Kesulitan Penelitian.....	175
B	Kerangka Pikir.....	176
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	177
A	Urgensi Negara dalam Memberikan Perlindungan Hak Keperdataan ALK.....	177



1.	Anak Luar Kawin.....	177
2.	Korelasi antara Hak Anak dan Hak Keperdataan ALK.....	181
3.	Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Hak Keperdataan ALK.....	193
	a. Pancasila.....	193
	b. Indonesia Negara Hukum Pancasila.....	209
	c. Prinsip Dasar Hak Anak.....	215
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Pemberian Hak Keperdataan ALK dalam Praktik.....</b>	<b>223</b>
1.	Hak Keperdataan ALK di Indonesia.....	223
	a. Hak Keperdataan ALK dalam Hukum Adat.....	223
	b. Hak Keperdataan ALK dalam Hukum Tertulis Indonesia.....	234
2.	Penyelesaian Perkara Hak Keperdataan ALK di Indonesia.....	244
	a. Penyelesaian Kasus Hak Keperdataan ALK di PA Jakarta Selatan.....	244
	b. Penyelesaian Kasus Hak Keperdataan ALK di PN Kota Semarang.....	261
<b>C</b>	<b>Pengaturan Hak Keperdataan ALK di Masa yang akan Datang.....</b>	<b>278</b>
1.	Pandangan Pemuka Agama Resmi Indonesia tentang Kawin Siri dan ALK.....	278
	a. Pandangan Majelis Ulama Indonesia.....	278
	b. Pandangan Pemuka Agama Katolik.....	284
	c. Pandangan Pemuka Agama Kristen.....	289
	d. Pandangan Pemuka Agama Hindu.....	291
	e. Pandangan Pemuka Agama Buddha.....	293
	f. Pandangan Pemuka Agama Kong Hu Cu.....	297
2.	Perkembangan Perlindungan Hak Keperdataan ALK pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.....	303
3.	Perlindungan Hak Keperdataan ALK dalam Pandangan Mahkamah Konstitusi.....	309
4.	Pencatatan Pengakuan Anak dan Pengesahan ALK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.....	313
5.	Praktik Perlindungan ALK pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	318
6.	Perbandingan dengan Pengaturan ALK dalam Sistem NBW.....	326



a.	Perkembangan <i>Burgerlijk Wetboek</i> di Belanda.....	326
b.	Hubungan Keperdataan antara Anak dengan Orangtuanya.....	327
c.	Pengakuan Anak dalam NBW.....	327
d.	Perbandingan antara Pengakuan ALK dalam Sistem UUP, KUHPerdata dan NBW.....	329
7.	Perlindungan ALK dalam Hukum Adat Minahasa.....	332
8.	Perbandingan Pengaturan Lembaga Pengakuan Anak dan Pengesahan ALK dalam Hukum Indonesia.....	328
9.	Dasar pertimbangan untuk Memberikan Hak Keperdataan bagi ALK.....	342
10.	Asas Hukum Adat sebagai <i>Ius Constituendum</i> .....	349
11.	Harmonisasi Norma Hukum bagi Perlindungan ALK di Indonesia.....	353
a.	Pendekatan Norma.....	353
b.	Pendekatan Kelembagaan.....	355
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	357
A	Kesimpulan.....	357
B	Saran.....	360
DAFTAR PUSTAKA.....		362
CURRICULUM VITAE.....		375